

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tercium Aroma Korupsi

Dewan Desak Tender Ulang Proyek JIS

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan tender ulang dan membatalkan pemenang tender proyek Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, tercium aroma yang tidak baik dan berpotensi korupsi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pemenang harus mampu menjaga kualitas dari hasil kerjanya dan tidak hanya diukur dari harga. Untuk menghindari polemik yang terlalu lama, karena pihak konsorsium Adhi Karya, Nindya Karya dan Indah Karya tidak menyetujui hasil lelang serta dirasa ada kejanggalan.

"Kualitas kan tidak bisa diukur dari harga, apakah yang harganya paling rendah harus menang kan tidak. Tapi ketika ada gap terlalu jauh kan menimbulkan persoalan. Gapnya masa

sampai Rp 300 miliar, selisih segitu bisa bisa bangun berapa rusun?" ungkap dia kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Gembong mengatakan, selain persoalan gap harga, lelang harus diulang karena ada subjektivitas terhadap pemenang dalam prosesnya. Meski pihak Japro sempat menyebutkan bahwa perbedaan harga yang jauh karena masalah teknis ■

"Nampaknya pemenang sudah bekerja duluan sebelum memenangkan lelang, subjektivitasnya munculnya disana. Masa soal subjektivitas dibayar begitu mahal. ini kan tidak rasional," kata Gembong.

Dua kejanggalan itulah, sambung Gembong, yang membuat DPRD DKI merekomendasikan adanya tender ulang, agar jangan terlalu lama berpolemik. Apalagi warga Jakarta menunggu stadion tersebut.

"Maka lebih baik tender ulang dan membatalkan pemenang, supaya proses pembangunan tidak terganggu. Apalagi tender ulang kan kewenangan Jakpro karena mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah," imbuh dia.

Gembong menambahkan, sejak awal DPRD DKI menentang penyertaan modal ke Jakpro sebesar Rp 4,7 triliun. Padahal jika proyek ini diserahkan ke dinas terkait yakni Pemuda dan Olaharaga maka legislatif bisa mengawasi dengan ketat, lain halnya jika diserahkan ke Jakpro.

"Kalau diserahkan ke Jakpro tangan legislatif tidak sampai disana. Beda kalau diserahkan ke dinas terkait bisa diawasi dengan ketat. Tapi kemarin kita merekomendasikan tender ulang, kita tunggu respon Jakpro," kata dia.

Hal itu diamini Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Pantas Nainggolan. Dia menyarankan, agar PT Jakarta Propertindo menunda pembangunan JIS atau dikenal juga Stadion BMW, menyusul dilayangkannya surat keberatan dari kerja sama operasi (KSO) PT Adhi Karya terhadap LKPP dan KPPU. "Sampai ada pendapat final dari kedua lembaga itu saya rasa proyek ini perlu ditunda," kata dia.

Ia khawatir akan timbul masalah di kemudian hari jika Pemprov DKI memaksa untuk terus melanjutkan pembangunan JIS. Padahal, ada peserta lelang yang mengajukan surat keberatan pada LKPP dan KPPU terkait proses tender pembangunan stadion bagi kandang Persija Jakarta itu.

Terpisah, Kepala Konstruksi

si JIS PT Jakpro Iwan Takwin menyatakan, proses tender atau lelang proyek pembangunan JIS sudah sesuai prosedur dan terbuka. "Semuanya sudah sesuai prosedur dan terbuka," akunya kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (11/9).

Iwan mengaku, bila ada pihak yang keberatan dengan proses pelelangan proyek JIS, hal tersebut sudah diselesaikan sebelum proses pembangunan dimulai. Menurut dia, tim tender juga memfasilitasi para peserta lelang yang merasa keberatan atau butuh penjelasan selama proses pelelangan.

Iwan menambahkan, keberatan Adhi Karya itu telah diselesaikan. Saat itu, Adhi Karya membuat surat pengaduan kepada direksi dan komisaris Jakpro. Sebagai langkah penyelesaian, Direksi dan Komisaris Jakpro saat itu langsung meminta tim tender untuk memberikan tanggapan dan penjelasan. "Oleh tim waktu itu sudah dijelaskan secara gamblang dan poin per poin," tandas dia.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Adhi Karya Ki Syahgolang Permata menyebutkan, salah satu poin dalam surat keberatan itu mempersoalkan KSO pemenang lelang yang tidak diundang oleh PT Jakpro. "Leader peserta lelang yang dimenangkan bukan pihak yang diundang panitia," ujar dia saat dihubungi, Rabu (11/9/2019). (aen)